

MEMORANDUM tentang laporan Federalism for Peace Foundation

Saudara-saudara sebangsa di Maluku dan di Belanda

Kami bersyukur bahwa setelah investigasi selama delapan bulan, Federalism for Peace Foundation merilis laporan ["Dari Cold Case ke Hot Case. Mengapa dan bagaimana Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat dan harus membebaskan orang-orang Maluku"](#) telah diterbitkan. Dengan mengklik tautan, saudara dapat mengunduhnya secara gratis dalam bahasa Belanda atau bahasa Inggris. Anda juga akan melihat rute Alternatif jika saudara memilih untuk tidak mengunduhnya. Jika saudara menggunakan Alternatif, laporan akan dikirimkan kepada saudara.

Penting untuk memahami beberapa hal untuk memahami laporan ini.

1. Laporan tentang kasus Maluku ini adalah kisah ilmiah. Jadi itu bukan kisah kelompok aksi Maluku. Beberapa peneliti dengan pengetahuan luas tentang penderitaan yang diderita kami telah memberi tahu PBB secara independen dan objektif tentang keseriusan kesalahan yang dibuat pada tahun 1949-1959 yang telah menduduki, menekan dan mengeksploitasi kami. Untuk mencegah orang-orang di Perserikatan Bangsa-Bangsa dari berpikir bahwa itu adalah kisah Maluku yang marah, para peneliti belum melakukan konsultasi substantif dengan Maluku. Bahkan dengan kami, para penandatanganan Nota Kesepahaman ini.
2. Kita semua tahu bahwa banyak publikasi telah dicurahkan untuk apa yang terjadi pada kita. Sekarang setelah delapan bulan mengunduh laporan pada 12 April dan mulai membacanya, kami melihat informasi yang belum pernah kami temukan di publikasi lain. Laporan tersebut mengungkapkan betapa seriusnya kerangka hukum telah dirusak dengan bahwa Maluku seharusnya menjamin hak yang tidak dapat dicabut untuk menentukan nasib sendiri. Laporan menunjukkan dengan analisis keras bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam bentuk Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia (UNCI) bersalah karena mengabaikan tanggung jawabnya secara serius, yang memungkinkan Sukarno merebut kekuasaan absolut. Laporan ini juga menunjukkan fakta dan argumen yang dengannya kita sebagai orang Maluku dapat menuntut agar PBB tetap dapat memulihkan penderitaan yang telah kita derita dengan memaksa Indonesia mengembalikan kedaulatan curian kepada kita.
3. Kami tidak akan mengulangi laporan di sini. Mereka yang mencintai Maluku harus membaca laporannya sendiri. Sepenuhnya. Itu tidak selalu mudah karena ini adalah laporan ilmiah, tetapi ditulis sedemikian rupa sehingga mungkin semua orang mengerti apa yang dikatakannya.
4. Biasanya saudara harus mulai dengan laporan seperti itu di awal dan hanya berhenti di akhir. Tetapi tidak semua orang merasa menyukainya. Itu sebabnya kami merekomendasikan rute berikut:
 - a) Pertama, baca Daftar Isi. Kemudian saudara akan melihat bagaimana laporan itu bekerja.
 - b) Kemudian lompat langsung ke Bab 15. Itu adalah Requisitoir ketika seorang jaksa mengatakan kepada hakim apa yang telah dilakukan oleh seorang tersangka. Dan apa

persyaratannya.

c) Jika Anda telah membaca bahwa Bab mengambil Bab 5, 6 dan 7. Itu adalah inti dari analisis tentang apa yang salah dan siapa yang bertanggung jawab untuk itu.

d) Kemudian saudara dapat mulai dari awal dan kemudian membaca laporan dengan tenang sampai akhir.

5. Dalam ringkasan yang sangat singkat, para peneliti menjelaskan bahwa kekacauan hukum raksasa dibuat di bawah tanggung jawab UNCI pada tahun 1949, bahwa Soekarno dapat menyalahgunakannya pada tahun 1950, bahwa Belanda memprotes hal ini, tetapi dikirim ke hutan oleh UNCI, bahwa Belanda pada akhirnya menyerah agar tidak merusak kepentingan ekonomi Uni Belanda-Indonesia, sehingga UNCI bermanuver sedemikian rupa sehingga Indonesia bisa menjadi anggota PBB setelah hanya satu bulan. Itulah intinya. Dan akar penyebab inti itu adalah konstitusi federal yang benar-benar salah, yang tidak diperhatikan siapa pun, benar-benar tidak ada, pada tahun 1949. Juga dalam lusinan publikasi tentang kasus Maluku. Jika saudara membaca Bab 6 dengan seksama, celana Anda akan jatuh setiap saat ketika menentukan bagaimana UNCI bisa membuat kekacauan seperti itu.
6. Jika saudara mengetahui hal ini, saudara memahami bahwa laporan tersebut bukan tentang peran Belanda. Ini bukan tentang kesalahan Belanda, bahkan jika itu secara teratur disebutkan dalam laporan. Ini tentang masalah yang kami yakini belum pernah dibahas dalam semua publikasi tentang kasus Maluku, yaitu kekacauan hukum, manipulasi politik, berpaling dari otoritas yang bertanggung jawab. Pesannya adalah: "Kesalahan serius yang dapat disalahkan dan dapat dihindari telah dilakukan di masa lalu dan mereka dapat dan harus diperbaiki. Tanggung jawab untuk ini sepenuhnya berada di tangan PBB. "
7. Tidak dapat disangkal bahwa laporan pada tanggal 25 April akan menyebabkan keributan di Maluku. Apakah itu masuk akal tergantung pada apa penekanannya. Jika ini gangguan terhadap Indonesia, ini tidak seharusnya menjadi kasus kami. Indonesia dapat menyingkirkannya dengan mantra terkenal "mereka separatis ekstremis". Manifestasi keresahan dan keresahan di Maluku harus didominasi oleh aksi nyata di belakang laporan. Jadi itu harus ditujukan untuk PBB dan bukan untuk Indonesia. PBB benar-benar salah pada tahun 1949-1950. Indonesia telah memanfaatkan kesempatan itu. Ingat pepatah: kesempatan membuat pencuri.
8. Yang terbaik adalah jika Komisi Orang Bijaksana bangkit sebelum 25 April di Maluku. Sebagian untuk mendesak orang-orang untuk tenang, sebagian untuk mendesak mereka untuk mendukung laporan dan mendukung Federalism for Peace Foundation dalam menyimpulkan bahwa apa yang salah dilakukan PBB pada saat itu dapat dan harus diperbaiki oleh PBB itu sendiri. Jadi - menggunakan Piagam PBB - untuk memaksa Indonesia, baik atau buruk, untuk mengembalikan kedaulatan ke Maluku, sehingga mereka dapat memutuskan sendiri apa yang mereka inginkan: negara kesatuan Maluku atau negara federal dengan yang lain. Saran para peneliti adalah: pilih negara federal dengan mitra di Oseania karena itulah masa depan. Negara-negara kesatuan akan segera menghilang.
9. Tentu saja ada orang yang meragukan apakah kita bisa mengumpulkan orang-orang Komisi setelah 70 tahun penindasan di Maluku. Reaksi kami adalah: jika ada orang di

Maluku yang dapat mengatur perlawanan, maka ada juga orang yang dapat mewujudkan kohesi dan koneksi. Jika kita sendiri tidak dapat bertindak sebagai orang dalam persatuan dan berdiri di belakang laporan ini bersama - mungkin kesempatan terakhir kita untuk menentukan nasib sendiri - maka kita mungkin juga tidak layak untuk itu.

10. Karena perbedaan pendapat, berbagai kelompok telah muncul dalam 70 tahun terakhir, yang semuanya mencoba dengan caranya sendiri untuk melayani kepentingan Maluku. Kami meminta mereka untuk mengubur kapak dan mengeluarkan pernyataan bersama bahwa orang-orang Maluku mendukung laporan ini dan meminta PBB untuk melakukan tugasnya seperti yang dijanjikan dalam Konvensi PBB, termasuk hak yang tidak dapat dicabut untuk menentukan nasib sendiri . Sebagai satu orang, mari kita dukung panggilan ini.
11. Kami orang Maluku adalah pejuang, kami adalah aktivis. Tetapi kita akan lebih bijaksana untuk meninggalkan sikap itu sekarang. Sebagai satu orang, mari kita berdiri di belakang laporan ini dan menyebarkan pesan dari laporan ini.
12. Kita tidak tahu apa hasil dari proses ini nantinya. Kami berharap, karena laporan ini banyak menekankan pada dua kutipan dari Sekretaris Jenderal PBB. Dengan pesan: letakkan tindakan saudara di tempat mulut saudara berada. Buktikan bahwa sebagai PBB saudara memiliki hak untuk eksis jika saudara menempelkan kutipan yang begitu berat pada struktur perjanjian dan mukadimah saudara yang luas dan artikel-artikel yang menjanjikan bahwa keadilan akan dilakukan untuk orang-orang seperti kita.
13. Karena itu adalah perjuangan politik dan Yayasan hanya menyediakan sarana hukum untuk memerangnya, terserah Maluku untuk membuat sarana politik sendiri. Selain instrumen hukum. Jadi pekerjaan kita terorganisir dengan baik - berbasis pengetahuan - politik jangka panjang, aksi tanpa kekerasan.
14. Kami belum akan menjawab pertanyaan tentang apa yang akan terjadi setelah Maluku mendapatkan kembali kedaulatan mereka, seperti reparasi, dll., Yang mengarah pada ketegangan yang tidak perlu, yang tidak membawa kebaikan bagi kasus ini. Kami akan terus menginformasikan semua pemangku kepentingan dan pihak yang berkepentingan.
15. Terima kasih kepada Leo Klinkers (Presiden Federalism for Peace Foundation) yang mendukung kami dalam merancang Memorandum ini:

T.A. Soumokil (Anak laki2 Dr. C.R.S. Soumokil)
Njonja J. Soumokil (Janda dari Dr. C.R.S. Soumokil)
15 April 2020